



**BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 07 TAHUN 2019**

TENTANG

SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

Menimbang

- a. bahwa untuk mendukung pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pencipta Arsip perlu membuat Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak-pihak yang tidak berhak;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, perlu menetapkan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan. Bupati tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;

Handwritten signature

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali,



terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (**Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1282**);
12. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;
13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi **dan** Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (**Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2008 Nomor 05**), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan **Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun. 2015** tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (**Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2015 Nomor 09**);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi **dan Tata Kerja Badan** Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin (**Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 01**);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09);
17. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018 Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM
KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP
DINAMIS.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Bupati adalah Bupati Tapin.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah, yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan.
6. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh Lembaga Negara, Pemerintahan Daerah, Lembaga Pendidikan, Perusahaan, Organisasi Politik, Organisasi Kemasyarakatan, Perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
7. Akses Arsip adalah ketersediaan arsip sebagai hasil dan kewenangan hukum dan otorisasi legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan arsip.
8. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
9. Penggunaan Arsip adalah kegiatan pemanfaatan dan penyediaan arsip bagi kepentingan pengguna arsip yang berhak.
10. Klasifikasi adalah proses identifikasi kategori-kategori kegiatan dan arsip dinamis yang dihasilkan dan mengelompokannya.

11. Klasifikasi Keamanan Arsip adalah kategori kerahasiaan informasi arsip berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkan terhadap kepentingan dan kearnanan negara, masyarakat dan perorangan.
12. Klasifikasi Akses Arsip adalah kategori pembatasan akses terhadap arsip berdasarkan kewenangan penggunaan arsip terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi tertentu.
13. Pengamanan Arsip adalah program perlindungan fisik dan informasi arsip berdasarkan klasifikasi keamanannya.
14. Terbatas adalah klasifikasi informasi dari arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.
15. Biasa/Terbuka adalah klasifikasi informasi dari arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.
16. Sangat Rahasia adalah klasifikasi informasi dari arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/ atau keselamatan bangsa.
17. Rahasia adalah klasifikasi informasi dari arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro apabila informasi yang terdapat pada arsip bersifat sensitif bagi lembaga/ organisasi akan menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi.
18. Prosedur Pengaksesan Informasi Publik adalah tata cara atau aturan ketersediaan informasi sesuai kewenangan hukum dan otorisasi legal pemanfaatan informasi publik.

19. Informasi yang dikecualikan adalah informasi yang apabila dipertimbangkan bahwa membuka informasi publik tersebut dapat menimbulkan konsekuensi sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta setelah dipertimbangkan secara seksama bahwa dengan menutup informasi dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya.
20. Pencipta arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otorisasi dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis.
21. Pengguna Internal adalah setiap orang atau unit kerja yang menggunakan arsip dan berasal dari lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin.
22. Pengguna Eksternal adalah setiap orang atau badan hukum yang menggunakan arsip dan berasal dari luar lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam rangka melindungi arsip dari pengaksesan yang tidak sesuai aturan sehingga mencegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak yang tidak berhak untuk tujuan dan kepentingan yang tidak sah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk menyediakan informasi arsip yang dikategorikan terbuka dan dapat diakses bagi kepentingan publik serta menjamin keamanan arsip bagi informasi yang dikecualikan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis; dan
- b. pengaturan akses arsip.

BAB III

SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS

Pasal 5

- (1) Asas klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis dilaksanakan dengan menerapkan asas gabungan.
- (2) Asas gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sentralisasi dalam penetapan kebijakan dan desentralisasi dalam pelaksanaan pengolahan arsip dinamis.

Pasal 6

- (1) Sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. arsip yang tercipta pada instansi pencipta dapat diklasifikasikan menjadi informasi biasa, terbatas, rahasia dan sangat rahasia;
 - b. keempat tingkat klasifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, berbeda dalam teknis pengamanannya, semakin tinggi tingkat klasifikasi informasinya semakin tinggi pula tingkat pengamanannya;
 - c. keempat tingkat klasifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, berbeda dalam pengaturan aksesnya, semakin tinggi tingkat klasifikasi informasinya semakin ketat pula dalam pengaturan aksesnya; dan
 - d. publik dapat mengakses informasi yang dikategorikan terbuka sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.
- (2) Sarana sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip menggunakan sarana perangkat keras dan perangkat lunak.



- (3) Perangkat keras sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. sarana penyimpanan arsip konvensional berupa *filling cabinet/ rak* arsip untuk menyimpan arsip biasaiterbuka, dan brankas atau lemari besi untuk arsip rahasia dan sangat rahasia;
 - b. sarana penyimpanan arsip media baru berupa lemari arsip sesuai dengan tingkat klasifikasi informasi; dan
 - c. prasarana berupa ruang penyimpanan yang representatif sesuai dengan tingkat klasifikasi informasi.
- (4) Perangkat lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. daftar arsip aktif, inaktif, terjaga dan vital; dan
 - b. aplikasi pengelolaan arsip aktif dan inaktif.
- (5) Sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan angka.
- (6) Sistem klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan klasifikasi bidang tugas sebagai berikut:
 - a. 000 Umum;
 - b. 100 Pemerintahan;
 - c. 200 Politik;
 - d. 300 Keamanan dan Ketertiban;
 - e. 400 Kesejahteraan;
 - f. 500 Perekonomian;
 - g. 600 Pekerjaan Umum dan Ketenagakerjaan;
 - h. 700 Pengawasan;
 - i. 800 Kepegawaian; dan
 - j. 900 Keuangan.

BAB IV

PENGATURAN AKSES ARSIP

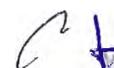
Pasal 7

- (1) Pengaturan akses arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b digunakan kepada pengguna arsip yang berhak.
- (2) Pengguna arsip yang berhak mengakses arsip terdiri dari:
 - a. pengguna internal; dan
 - b. pengguna eksternal.

Pasal 8

(1) Pengguna internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) terdiri dari:

- a. penentu kebijakan yang mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip yang berada dibawah kewenangannya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Jabatan Pimpinan Tinggi, yaitu Kepala Perangkat Daerah mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip yang berada di bawah kewenangannya;
 2. Jabatan Administrator yaitu Sekretaris, Kepala Bagian, dan Kepala Bidang yang mempunyai kewenangan untuk mengakses arsip di bawah kewenangannya, namun tidak diberikan hak akses untuk informasi yang terdapat pada pimpinan level tertinggi dan yang satu level dengan unit diluar unit kerjanya, kecuali telah mendapatkan izin; dan
 3. Jabatan Pengawas yaitu Kepala Subbidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi yang mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip di bawah kewenangannya, namun tidak diberikan hak akses untuk informasi yang terdapat pada pimpinan level tertinggi, pimpinan level tinggi, dan yang satu level di luar unit kerjanya kecuali telah mendapatkan izin.
- b. pelaksana kebijakan yaitu staf, petugas arsip, arsiparis dan pegawai yang mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip yang berada di bawah kewenangannya dengan tingkat klasifikasi biasa, tetapi tidak diberikan hak akses untuk arsip dengan tingkat klasifikasi terbatas, rahasia, dan sangat rahasia yang terdapat pada Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan yang satu tingkat diatas unit kerjanya kecuali telah mendapatkan izin; dan



- c. pengawas internal mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip pada pencipta arsip dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah.
- (2) Pengguna eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b terdiri dari:
- a. publik yang berhak, mempunyai hak untuk mengakses seluruh arsip dengan kategori biasa/ terbuka;
 - b. pengawas eksternal, mempunyai hak untuk mengakses seluruh arsip pada pencipta arsip dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, dan Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan; dan
 - c. aparat penegak hukum, mempunyai hak untuk mengakses arsip pada pencipta arsip yang terkait dengan perkara atau proses hukum yang sedang ditanganinya dalam rangka melaksanakan fungsi penegakan hukum.

Pasal 9

Pengaturan akses arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) disusun dalam daftar arsip dinamis diuraikan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Lampiran I Kode Angka 000 Bidang Tugas Umum;
- b. Lampiran II Kode Angka 100 Bidang Tugas Pemerintahan;
- c. Lampiran III Kode Angka 200 Bidang Tugas Politik;
- d. Lampiran IV Kode Angka 300 Bidang Tugas Keamanan dan Ketertiban;
- e. Lampiran V Kode Angka 400 Bidang Tugas Kesejahteraan;
- f. Lampiran VI Kode Angka 500 Bidang Tugas Perekonomian;
- g. Lampiran VII Kode Angka 600 Bidang Tugas Pekerjaan Umum dan Ketenagakerjaan;

- h. Lampiran VIII Kode Angka 700 Bidang Tugas Pengawasan;
- i. Lampiran IX Kode 800 Bidang Tugas Kepegawaian; dan
- j. Lampiran X Kode Angka 900 Bidang Tugas Keuangan.

Pasal 10

- (1) Pengaturan akses arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilaksanakan dalam rangka pengamanan fisik dan informasi arsip.
- (2) Pengamanan fisik dan informasi arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara keseluruhan mencakup fasilitas pengamanan seperti pemasangan kamera pengawas/*closed circuit television* (CCTV), kunci pengamanan ruangan dan media simpan arsip.
- (3) Pengamanan fisik dan informasi arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kategori arsip biasa/umum/terbuka disimpan pada rak besi;
 - b. kategori arsip terbatas disimpan pada *filling cabinet*; dan
 - c. kategori arsip rahasia dan sangat rahasia disimpan pada lemari besi.
- (4) Pengamanan fisik dan informasi arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penciptaan daftar arsip terbatas dan daftar arsip rahasia.
- (5) Pengamanan fisik dan informasi arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Arsiparis dan/atau petugas kearsipan yang diberi kewenangan dan tanggung jawab mengelola dan mengamankan fisik serta informasi arsip.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

**Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tapin.**

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 10 Juni 2010
BUPATI TAPIN,

..

ARIFIN ARPAN

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 10 10 10

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

MASYRANIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2019 NOMOR

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR : 07 AT/MT 20 19
TANGGAL : 10 Juli 20 19

I. UMUM						
NO	KLASIFIKASI	J ENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
1	000	UMUM				
	001	Lambang	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		<ul style="list-style-type: none"> - Garuda - Bendera Kebangsaan - Daerah - Propinsi - Kota/Kabupaten 				
	002	Penghargaan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		<ul style="list-style-type: none"> - Bintang - Satya Lencana - Samkarya Nugraha - Monumen 				

	<ul style="list-style-type: none"> - Penghargaan secara adat - Penghargaan lainnya 				
003	<ul style="list-style-type: none"> Hari Raya/ Besar - Nasional 17 Agustus, Hari Pahlawan dsb - Keagamaan- Idul Fitri- Natal dll - Hari Ulang Tahun (HUT) 	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
004	<ul style="list-style-type: none"> Ucapan - Ucapan Terimakasih - Ucapan Selamat - Ucapan Belasungkawa - Ucapan lainnya 	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis .
005	Undangan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis .
006	<ul style="list-style-type: none"> Tanda Jabatan - Pamong Praja - Tanda Pengenal - Pejabat lainnya 	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis .
010	URUSAN DALAM				
011	Gedung Kantor	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis .
012	<ul style="list-style-type: none"> Rumah Dinas - Tanah untuk rumah dinas 	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis .

	- Perabotan					
013	Mess/ Guest House	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis .	
014	Rumah Susun/ Apartemen.	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis .	
015	Penerangan Listrik/ Jasa Listrik	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis .	
016	Telep on / Faximili/ Internet	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis .	
017	Keamanan / Ketertiban Kantor	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis .	
018	Kebersihan Kantor	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis .	
019	Protokol - Upacara Bendera - Tatatempat - Pemasangan gambar Presiden dan Wakil Presiden - Audiensi - Alamat-alamat Kantor dan Pejabat - Sambutan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis .	
3	020	PERALATAN -Penawaran, Ekspose	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	021	Alat Tulis	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis .
	022	Mesin Kantor	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis .
	023	Pejabat Kantor	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis .

	024	Alat Angkutan	Biasa Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	025	Pakaian Dinas	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis .
	026	Senjata	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis .
	027	Pengadaan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	028	Inventaris	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis .
4	030	KEKAYAAN DAERAH				
	031	Sumber Daya Alam	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis .
	032	Aset Daerah	Terbatas	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
5	040	PERPUSTAKAAN/DOKUMENTASI/KEARSIPAN/ SANDI				
	041	Perpustakaan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	042	Dokumentasi -Foto - Audio - Video	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	045	Kearsipan - Pola Klasifikasi - Penataan Berkas Penyusutan Arsip - Pembinaan Kearsipan - Pemeliharaan /perawatan arsip	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	046	Sandi - Peralatan	Rahasia	Eselon III	Memiliki dampak keamanan Rahasia Negara	Bidang Teknis

		-Sistem -Sumber Daya Manusia -Pembinaan Persandian				
6	050	PERENCANAAN - REPELITA PelitaDaerah - Bantuan PembangunanDaerah - Bappeda - Perencanaan/ Proyek bidangperalatan - BidangPerpustakaan - BidangKearsipan. - BidangSandi - Organisasi/Ketataaksanaan - Penelitian	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sub. Bag., Sub Bid, Sub Bag.
	051	Bidang Pemerintahan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	052	Bidang Politik	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	053	Bidang Keamanan Ketertiban	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	054	Bidang Kesejahteraan Rakyat	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	055	Bidang Perekonomian	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	056	Bidang Pekerjaan Umum	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	057	Bidang Penmgawasan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak	Bidang Teknis

				yang mengganggu kinerja		
	058	Bidang Kepegawaian	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	059	Bidang Keuangan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
7	060	ORGANISASI/KETATALAKSANAAN				
	061	Organisasi pemerintah - Susunan dan tatakerja - Tata tertib Kantor, jamkerja	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	062	Organisasi Badan Non Pemerintah	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	063	Organisasi Badan Internasional	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	064	Organisasi Semi Pemerintah	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	065	Ketatalaksanaan/ tata naskah/Sistem	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	066	Stempel Dinas	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	067	Pelayanan Umum	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	068	Komputerisasi/Siskomendagri	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
8	070	PENELITIAN				
	071	Riset	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	072	Survey	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	073	Kajian	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
			Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	074	Kerjasama Penelitian dengan Perguruan Tinggi	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

	075	Departemen	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	076	Non Departemen	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	077	Provinsi	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	078	Kabupaten/Kota	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	079	Kecamatan/Desa	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
9	080	KONFERENSI				
	081	Gubernur	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	082	Bupati/Walikota	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	083	Komponen eselon lainnya	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	084	Instansi Lainnya	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja -	Bidang Teknis
	085	Internasional di dalam Negeri	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	086	Internasional di luar Negeri	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
10	090	PERJALANAN DINAS				
	091	Perjalanan Presiden dan Wakil Presiden	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	092	Perjalanan Menteri ke daerah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	093	Perjalanan Pejabat Tinggi (Pejabat Eselon I)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	094	Perjalanan Pegawai, termasuk pemanggilan Pegawai	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	095	Perjalanan Tamu Asing ke Daerah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

096	Perjalanan Presiden dan Wakil Presiden Keluar Negeri	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
097	Perjalanan Menteri ke luar Negeri	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
098	Perjalanan Pejabat Tinggi ke Luar Negeri	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
099	Perjalanan Pegawai ke Luar Negeri	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

☺ - BUPATI TAPIN,



M. ARIFIN ARPAN JP"

II. PEMERINTAHAN

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	
	130	PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA				
	131	Bupati meliputi				
		-Pencalonan,	terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		-Pengangkatan,	terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		-Pelantikan,	terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		-Pemberhentian,	terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		- Serah Terima Jabatan,	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		-Berita Acara Serah Terima Jabatan,	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		-Meninggal,	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

	- Memori Kepala Daerah,	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
131	Sambutan/ Pengarahan/ Amanat	Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
132	Wakil Bupati meliputi				
	-Pencalonan,	terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	-Pengangkatan,	terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	-Pelantikan,	terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	-Pemberhentian,	terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	- Serah Terima Jabatan,	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	-Berita Acara Serah Terima Jabatan,	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang Mengganggu kinerja	Bidang Teknis
133	Sekretaris Daerah Kabupaten meliputi				
	-Pencalonan,	terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	-Pengangkatan,	terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	-meninggal	terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

		Pembentukan Ibukota/Kota	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Pemberian Dan Penggantian Nama Kota, Daerah, Jalan.	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
136		Pembagian Wilayah	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
137		Penyerahan Urusan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
138		Pemerintah Wilayah Kecamatan	terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Sambutan/ Pengarahan/ Amanat	terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Pembentukan Kecamatan	terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Pemekaran Kecamatan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Perluasan/Perubahan Batas Wilayah Kecamatan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Pembentukan Perwakilan Kecamatan	terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
139		Laporan	terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Monitoring	terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Evaluasi	terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

2	140	PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN				
	141	Pamong Desa, meliputi: Pencalonan, Pemilihan, Meninggal, Pengangkatan, Pemberhentian, dan Sebagainya	terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	142	Penghasilan Pamong Desa	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	143	Kekayaan Desa/kelurahan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	144	Dewan Tingkat Desa/kelurahan, Dewan Marga, Rembug Desa/kelurahan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	145	Administrasi Desa/kelurahan	terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	146	Kewilayahan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Pembentukan Desa/Kelurahan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Pemekaran Desa/Kelurahan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Perubahan Batas Wilayah/Perluasan Desa/ Kelurahan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Perubahan Nama Desa/Kelurahan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Kerjasama antar Desa/kelurahan	Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	147	Lembaga-lembaga Tingkat Desa, jangan klasifikasikan di sini, lihat 410 dengan Perinciannya	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	148	Perangkat Kelurahan	Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

		Kepala Kelurahan	Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Sekretaris Kelurahan	Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Staf Kelurahan	Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	149	Dewan Kelurahan	Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Rukun Tetangga	Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Rukun Warga	Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
3	170	DPRD KABUPATEN				
	171	Keanggotaan	Terbatas	Esselon HI	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Pencalonan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Pengangkatan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Pemberhentian	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Recall	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Pelanggaran	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

	Pergantian Antar Waktu	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
172	Persidangan - Reses	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
173	Kesejahteraan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	Keuangan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	Penghargaan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
174	Hak	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
175	Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
4	180	HUKUM			
	Konstitusi	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	Dasar hukum	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	Undang Undang Dasar	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	Garis Besar Haluan Negara	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	Amnesti, Abolisi, dan Grasi	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
181	Perdata	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	Tanah	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

	Rumah	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	Utang/ Piutang	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	Gadai	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	Hipotik	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	Notariat	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
182	Pidana	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
183	Peradilan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	Bantuan hukum	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
184	Hukum Internasional	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
185	Imigrasi	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	Visa	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	Pasport	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	Exit	Terbatas	Esselon HI	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	Reentry	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

		Lintas Batas/ Batas antar Negara	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	186	Rumah Tahanan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	187	Kejaksaan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	188	Peraturan Perundang-undangan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Peraturan Daerah	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Peraturan Kabupaten/Kota	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Keputusan Bupati	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
5	197	Kerjasama dengan Lembaga Asing	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

,k- BUPATI TAPIN,

M. ARIFIN ARPAN

III. POLITIK							
NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3		4	5	6	7
1	200	POLITIK					
		-	Kebijakan Umum Orde Baru Reformasi	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	210		KEPARTAIAN Meliputi : pencalonan, pemilihan, Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pembubaran	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
		-	lambang Partai Kartu Tanda Anggota Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga (AD/ART)	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
		-	Bantuan keuangan Parpol Rapat Koordinasi konsolidasi partai	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsidan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis

2	220		ORGANISASI KEMASYARAKATAN				
	221	- - - -	Berdasarkan Perjuangan Berkas tentang perjuangan perintis kemerdekaan Berkas tentang perjuangan angkatan 45 Berkas tentang perjuangan Veteran	Terbatas	Eselon. III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	222	- - -	BerdasarkanKekaryaan Kekaryaan Pepabri Kekaryaan Wredatama	Terbatas	Eselon. III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	223	-	Berdasarkan Kerohanian	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	224	-	Lembaga Adat	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
3	230		ORGANISASI PROFESI DAN FUNGSIONAL				
	231	-	Ikatan Dokter Indonesia	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	232	-	Persatuan Guru Republik Indonesia	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	233	-	Persatuan Sarjana Hukum Indonesia	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis

234	-	Persatuan Advokat Indonesia	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
235		Lembaga Bantuan Hukum Indonesia	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
236		Korps Pegawai Republik Indonesia	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
237		Persatuan Wartawan Indonesia	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
238		Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI)	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
239		Organisasi Profesi dan fungsional lainnya	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
4	240	ORGANISASI PEMUDA				

241	-	Organisasi Kepemudaan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
242	-	Organisasi Mahasiswa	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
243	-	Organisasi Pelajar	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
244	-	Organisasi Pemuda Keagamaan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
250		ORGANISASI BURUH,TANI,NELAYAN DAN ANGKUTAN				
251	-	Organisasi Buruh Nasional	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
252	-	Organisasi Buruh Internasional	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
253	-	Organisasi Tani	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis

254	-	Organisasi Nelayan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
255	-	Organisasi Angkutan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
260		ORGANISASI WANITA				
261	-	Dharma Wanita	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
262	-	Persatuan Wanita Indonesia	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
263	-	Pemberdayaan Perempuan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
264	-	Kongres Wanita	Terbuka	Eselon. III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis

265	-	Organisasi Wanita Keagamaan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
270		PEMILIHAN UMUM				
271	-	Pene alonan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
272	-	Nomor urut Partai/ Tanda Gambar	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
273	-	Kampanye / Dana	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
274	-	Petugas Pemilu	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
275	-	Pemilih / Daftar Pemilih	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
276	- - -	Sarana Sarana T P S Sarana kendaraan	Terbuka	Eselon. III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis

	285	-	Pemilih / Daftar Pemilih	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	286	- - - - -	Sarana Sarana T P S Sarana kendaraan Surat suara Kotak suara	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	287	-	Pemungutan suara / Penghitungan suara	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	288	-	Pengambilan sumpah/janji anggota MPR,DPR,DPD	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsidan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
9	290		KOMISI PEMILIHAN UMUM/ BAWASLU				
	291	-	Panwaslu	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkatdaerah unit kerja	Bidang Teknis

4.4. BUPATI TAPIN, 11

||
' M. ARIFIN ARPAN

LAMPIRAN IV PERATURAN

NOMOR : 07 T ATTP 20 / 9

TANGGAL : / O .irruT 20 / 9

IV. KEAMANAN DAN KETERTIBAN							
NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2	3		4	5	6	7
	300	KEAMANAN/KETERTIBAN					
	301		Polisi Pamong Praja	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	302		Penertiban PKL	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	303		P S K	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis

	304	-	Gepeng		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unitkerja a	Bidang Teknis
	305	-	P P N S		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unitkerja	Bidang Teknis
2	310	PERTAHANAN						
	311	-	Darat		Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin	Bidang, Seksi, SuBag
	312	-	Laut		Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin	Bidang Teknis
	313	-	Udara		Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin	Bidang Teknis
	314	-	Perbatasan		Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin	Bidang Teknis

320		KEMILITERAN				
321	-	Latihan Militer	terbatas	Eselon III	Mengakibatkan terganggungan keamanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin	Bidang Teknis
322	-	Wajib Militer	terbuka	Eselon. III	Mengakibatkan terganggungan keamanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin	Bidang Teknis
323	-	Operasi Militer	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggungan keamanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin	Bidang Teknis
.324	-	Kekayaan ABRI/ TNI	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggungan keamanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin	Bidang Teknis
325	-	Pejabat Sipil dari ABRI/TNI Klasifikasi Dwifungsi ABRI/TNI	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggungan keamanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin	Bidang Teknis
330		KEAMANAN				
331	-	Kepolisian	Terbatas	Eselon II	Mengakibatkan terganggungan keamanan di lingkungan. Pemerintah Kabupaten Tapin	Bidang Teknis

332	-	Hum hara/ demonstrasi	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggungan keamanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin	Bidang Teknis
333	-	Senjata api/ senjata tajam	terbatas	Eselon II	Mengakibatkan terganggungan keamanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin	Bidang Teknis
334	-	Bahan Peledak	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggungan keamanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin	Bidang Teknis
335	-	Perjudian	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unitkerja	Bidang Teknis
336	-	Surat surat Kaleng	Rahasia	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unitkerja	Bidang Teknis
337	-	Pengaduan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan	Bidang Teknis

					tugas perangkat daerah unitkerja a	
338	-	Himbauan / larangan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
340	PERTAHANAN SIPIL					
341	-	Perlindungan Masyarakat (Linmas)	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggukerja	Bidang Teknis
350	KEJAHATAN					
351	-	Makar / Pemberontakan	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggun keamanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin	Bidang Teknis
352	-	Pembunuhan	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggun keamanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin	Bidang Teknis
353	-	Penganiayaan,pencurian dan perampasan	Rahasia	Eselon III	Mengakibatkan terganggun keamanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin	Bidang Teknis
354	-	Subversi/Penyelundupan/Narkotika	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggun keamanan di lingkungan. Pemerintah Kabupaten Tapin	Bidang Teknis

355	-	Pemalsuan	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunan keamanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin	Bidang Teknis
356	-	Korupsi / Penyelewengan / Penyalahgunaan Jabatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
357	-	Perkosaan/Perbuatan Cabul	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
358	-	Kenakalan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
359	-	Kajahatan Lainnya	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsidan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
360	BENCANA					
361	-	Gunung berapi / gempa	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

362	-	Banjir / tanah longsor	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
363	-	Angin Topan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
364	-	Kebakaran - Pembinaan, - Penanggulangan, - Pencegahan - Pemadaman - Pengujian instalasi - Antisipasi - Proteksi, APAR - Kebutuhan sarpras	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
365	-	Kekeringan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
366	-	Tsunami	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
370	-	KECELAKAAN SAR	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
371	-	D a r a t	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

372	-	U d a r a	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggukinerja	Bidang Teknis
373	-	L a u t	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggukinerja	Bidang Teknis
374	-	Sungai / danau	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggukinerja	Bidang Teknis

-BUPATI TAPIN,E

(/ M. ARIFIN ARPAN

V. KESEJAHTERAAN RAKYAT

NO.	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
1	400	KESEJAHTERAAN RAKYAT				
	401	Keluarga Miskin	Biasa / Terbuka	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsidan tugas OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	402	Bantuan Langsung Tunai (BLT)	Biasa / Terbuka	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsidan tugas OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	403	Raskin	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	404	Askeskin	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	405	Jamkessos/Jamkesda	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis

2	410	PEMBANGUNAN DESA/KELUARAHAN					
	411	PEMBINAAN USAHA GOTONG ROYONG					
		a.	Swadaya Gotong Royong	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD /unit kerja	Bidang Teknis
			1) Penataan gotongroyong 2) Gotong royongdinamis 3) Gotong royongstatis 4) Pungutan				
		b.	Lembaga Sosial Desa (LSD)	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD /unit kerja	Bidang Teknis
			1) Pembinaan, 2) Klasifikasi, 3) Proyek, 4) Musyawarandesa				
		c.	Latihan Kerja Masyarakat	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD /unit kerja	Bidang Teknis
			1) Kadermasyarakat, 2) Kuliah Kerja Nyata(KKN), 3) Pusatlatihan, 4) Kursus-kursus, 5) Kurikulum/ syllabus, 6) Keterampilan, 7) Pramuka				
		d.	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota (LPMK)	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		e.	Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/ unit kerja	Bidang Teknis
f.		Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis	

		1) Program, 2) Pembinaan organisasi, 3) Kegiatan				
	g.	Penyuluhan	Biasa/ Terbuka	Eselon HI	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD /unit kerja	Bidang Teknis
		1) Publikasi, 2) Peragaan, 3) So siodrama, 4) Siaran pedesaan, 5) Penyuluhan lapangan				
	h	Kelembagaan Desa	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		1) Kelompok tani, 2) Rukuntani 3) Subak 4) Dharma Tirta				
412	PEREKONOMIAN DESA					
	a.	Produksi Desa	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		1) Pengolahan 2) Pemasaran				
	b.	Keuangan Desa	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD /unit kerja	Bidang Teknis
		1) Perkreditandesa, 2) Inventarisasidata, 3) Perkembangan/ pelaksanaan 4) Bantuan / stimulans 5) Petunjuk/ pembinaan pelaksanaan				
	c.	Koperasi Desa	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD /unit kerja	Bidang Teknis
		1) Badan Usaha Unit Desa (BUUD)				

	2) Koperasi Unit Desa (KUD)				
d.	Penataan Bantuan Pembangunan Desa	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	1) Jumlah desa yang diberi bantuan, 2) Pengarahan 3) Pusat 4) Daerah				
e.	Alokasi Bantuan Pembangunan Desa	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD /unit kerja	Bidang Teknis
	1) Pusat 2) Daerah				
f.	Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	1) Bantuan langsung, 2) Bantuankeserasian, 3) Bantuan juara lombadesa				
g.	Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM)	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	Berkas tentang program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri (PNPM)				
PRASARANA DESA					
a.	Prasarana Desa	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak	Bidang Teknis

	1) Pembinaan 2) Bimbingan teknis			yang mengganggu kinerja OPD /unit kerja	
b.	Pemukiman Kembali Penduduk	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	1) Lokasi, 2) Diskusi 3) Pelaksanaan				
c.	Masyarakat Pradesa	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	1) Pembinaan 2) Penyuluhan				
d.	Pemugaran Perumahan dan Lingkungan Desa	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / unit kerja	Bidang Teknis
	1) Rumahsehat, 2) Proyekperintis, 3) Pelaksanaan, P 4) Pengembangan 5) Perbaikankampung				
414	PENGEMBANGAN DESA				
a.	Tingkat Perkembangan Desa	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	1) Jumlandesa, 2) Pemekarandesa, 3) Pembentukan desabarua, 4) Evaluasi, 5) Bagan				
b.	Unit Desa Kerja Pembangunan (UDKP)	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	1) Penyuluhanprogram, 2) LokasiUDKP, 3) Pelaksanaan, 4) Bimbingan/ pembinaan, 5) Evaluasi				

c.	Tata Desa	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	1) Inventarisasi, 2) Penyusunan pola tatadesa, 3) Aplikasi tatadesa, 4) Pemetaan, 5) Pedomanpelaksanaan, 6) Evaluasi				
d.	Perlombaan Desa	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD /unit kerja	Bidang Teknis
	1) Pedoman, 2) Penilaian, 3) Kejuaraan, 4) Piagam				
KOORDINASI					
a.	Sektor Khusus	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD /unit kerja	Bidang Teknis
	Berkas tentang koordinasi sector khusus di Pemerintah Kota Yogyakarta				
b.	Rapat Koordinasi Horizontal (RKH)	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	Berkas tentang rapat koordinasi ahorizontal dengan lembaga di lingkungan internal dan eksternal Pemerintah Kota Yogyakarta				
c.	Tim Koordinasi Pusat (TKP)	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/ unit kerja	Bidang Teknis
	Berkas tentang tim koordinasi pusat				
d.	Kerjasama	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak	Bidang Teknis

		1) Luar negeri(UNICEF), 2) Perguruan tinggi, 3) Departemen/lembaganon Departemen			yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	
3	420	PENDIDIKAN				
	421	SEKOLAH				
	a.	Pra Sekolah	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	b.	Sekolah Dasar/Sederajat	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	c.	Sekolah Menengah/Sederajat	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	d.	Sekolah Tinggi/ Sederajat	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	e.	Sekolah Kejuruan/Sederajat	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	f.	Kegiatan Sekolah, Dies Natalis, Lustrum	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	g.	Kegiatan Pelajar	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	1) Reuni,darmawisata, 2) Organisasi Siswa Intra Sekolah(OSIS), 3) Pelajar teladan,dan 4) Resimen Mahasiswa (MENWA)					
h	Sekolah Pendidikan Luar Biasa	Biasa Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis	

	c.	Diskusi	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD /unit kerja	Bidang Teknis
	d.	Kuliah lapangan, Widyawisata, KKN, Studi Tour	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD /unit kerja	Bidang Teknis
	e.	Kurikulum	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	f.	Karya Tulis	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	g.	Ujian	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
424	TENAGA PENGAJAR Berkas tentang tenaga pengajar yang meliputi guru, dosen, dekan, rector dan guru teladan		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD /unit kerja	Bidang Teknis
425	SARANA PENDIDIKAN					
	a.	Gedung	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD /unit kerja	Bidang Teknis
		1) Gedungsekolah, 2) Kampus 3) Pusat kegiatanmahasiswa				
	b.	Buku	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		Berkas tentang buku pelajaran dan diktat kuliah				
	c.	Perlengkapan Sekolah	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD /unit kerja	Bidang Teknis
		Berkas tentang perlengkapan sekolah				

426	KEOLAHRAGAAN					
	a.	Cabang Olah Raga	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang menggangukinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	b.	Sarana	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		1) Gedung olahraga, 2) Stadion, 3) Lapangan, 4) Kolamrenang				
	c.	Pesta Olah Raga	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	d.	KONI	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang menggangukinerja OPD / unit kerja	Bidang Teknis
427	KEPEMUDAAN Berkas tentang kepemudaan yang meliputi organisasi pemuda, kegiatan remaja dan gelanggang remaja		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
428	KEPRAMUKAAN		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
429		PENDIDIKAN KEDINASAN DEPDAGRI	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang menggangukinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
430	KEBUDAYAAN					
431	KESENIAN					

	a.	Cabang Kesenian	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/ unit kerja	Bidang Teknis
	b.	Sarana	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / unit kerja	Bidang Teknis
		Berkas tentang gedung kesenian				
		KEPURBAKALAN				
	a.	Museum	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	b.	Peninggalan Kuno	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		1) Candi, termasuk pemugaran 2) Benda peninggalankuno				
		SEJARAH	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		BAHASA	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		USAHA PERTUNJUKAN, HIBURAN, KESENANGAN	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		Berkas tentang usaha pertunjukan, hiburan, dan kesenangan				
		KEPERCAYAAN	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		Berkas tentang kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa				
		KESEHATAN				

441	L	PEMBINAAN KESEHATAN				
	a. b. c. d. e. d. e. f. g. h	Gizi Mata Jiwa Kanker Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Perawatan PenyuluhanKesehatan Masyarakat (PKM) Pekan Imunisasi Nasional	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
442		OBAT-OBATAN				
	a. b.	Pengadaan Penyimpanan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas OPD/unitkerja	Bidang Teknis
443		PENYAKIT MENULAR				
443	a.	Pencegahan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/ unit kerja	Bidang Teknis
	b.	Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Menular Langsung (P2ML)	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		1) Kusta 2) Kelamin 3) Frambosia 4)TBC/AIDS/HIV				
	c.	Epidemiologi dan Karantina (Epjdka)	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		1) Kholera 2) Imunisasi				

		3) Surveilense 4) Rabies/ anjing gila, Antraks				
	d.	Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Menular Sumber Binatang (P2B)	Biasa/ Terbuka	Eselon HI	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		1) Malaria 2) Dengue Faemorrhagic Fever (Demam Berdarah HDF) 3) Filaria 4) Serangga				
	e.	Hygiene Sanitasi	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		1)Tempat-tempat Pembuatan dan penjualan makanan dan minuman(TPPMM) 2) Sarana air minum dan jamban keluarga(Samijaga) 3) Pestisida				
444		GIZI				
444	a. b. c. d. e.	Kekurangan Makanan, Bahaya Kelaparan, Busung Lapar Keracunan Makanan Menu Makanan Rakyat Badan Perbaikan Gizi Daerah (BPGD) Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS)	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas OPD/unit kerja	Bidang Teknis
445		RUMAH SAKIT, BALAI KESEHATAN, PUSKESMAS,	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

		PUSKESMAS KELILING, POLIKLINIK, POSYANDU			OPD /unit kerja	
	446	TENAGA MEDIS	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	447	ALAT MEDIS	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD /unit kerja	Bidang Teknis
	448	PENGOBATAN TRADISIONAL				
	448	a. Pijat b. Tusuk jarum c. Jamu tradisional/ herbal d. Dukun/paranormal	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD /unit kerja	Bidang Teknis
6	450	AGAMA				
	451	ISLAM				
		a. Peribadatan 1) Sholat 2) Zakat, Fitrah 3) Puasa 4) MTQ	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD /unit kerja	Bidang Teknis
		b. Rumah Ibadah	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD /unit kerja	Bidang Teknis
		c. Tokoh Agama	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD /unit kerja	Bidang Teknis
		d. Pendidikan 1) Tinggi 2) Menengah 3) Dasar 4) PondokPesantren	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis

	5) Gedung Sekolah 6) Tenaga Pengajar 7) Buku 8) Dakwah 9) Organisasi/ Lembaga Pendidikan 10) TPA/TQA/TPQ				
e.	Harta Agama	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
f.	Peradilan	terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
g.	Organisasi Keagamaan Bukan Politik	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	Berkas tentang Majelis Ulama Indonesia				
h	Mazhab	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas OPD / unit kerja	Bidang Teknis
452	KRISTEN PROTESTAN				
a.	Peribadatan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD /unit kerja	Bidang Teknis
b.	Rumah ibadah				
c.	Tokoh agama, rohaniawan,				
d.	pendeta, domine				
e.	Mazhab Organisasi gerejani				
453	KATHOLIK				
a.	Peribadatan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak	Bidang Teknis

		b. c. d. e.	Rumah ibadah Tokoh agama, rohaniawan, pastor Mazhab Organisasi gerejani			yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	
	454		HINDU				
	454	a. b. c. d. e.	Peribadatan Rumah ibadah Tokoh agama, rohaniawan Mazhab Organisasi keagamaan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	455		BUDHA				
	455	a. b. c. d. e.	Peribadatan Rumah ibadah Tokoh agama, rohaniawan Mazhab Organisasi keagamaan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	456		URUSAN HAJI				
	456	a. b. c.	ONH Umroh Manasik	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
7	460		SOSIAL				
	461		REHABILITASI PENDERITA CACAT				
		a. b. c. d.	Cacat Mata Cacat tubuh Cacat mental Bisu tuli	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis

462		TUNA SOSIAL				
	a. b. c. d.	Gelandangan Pengemis Tuna susila Anak nakal/anak jalanan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
463		KESEJAHTERAAN ANAK/KELUARGA				
	a. b. c. d.	Anak Putus Sekolah Ibu teladan Keluarga sakinah Anak asuh	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
464		PEMBINAAN PAHLAWAN				
	a. b. c.	Pahlawan Perintis kemerdekaan Cacat veteran	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
465		KESEJAHTERAAN SOSIAL				
	a. b.	Lanjut Usia Korban Kekacauan, Pengungsi, Repatriasi	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
466		SUMBANGAN SOSIAL				
	a. b. c. d.	Korban Bencana Pencarian Dana untuk Sumbangan Panti Asuhan Panti Jompo	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
467		BIMBINGAN SOSIAL	Biasa/ Terbuka			
		Berkas tentang bimbingan, pendidikan, kesehatan, dan		Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis

		pemukiman untuk masyarakat suku terasing				
468		PMI	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
469		MAKAM				
	a.	Umum	Biasa/ Terbuka	Eselon HI	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	b.	Pahlawan				
	c.	Khusus keluarga raja				
	d.	Krematorium				
8	470	KEPENDUDUKAN				
	471	PENDAFTARAN PENDUDUK				
	a.	Identitas Penduduk	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		1) Biodata				
		2) Nomor Induk Kependudukan				
		3) Kartu Tanda Penduduk				
		4) Kartu Keluarga				
		5) Advokasi Identitas Penduduk				
	b.	Perpindahan Penduduk dalam Wilayah Indonesia	Terbatas	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		1) Perpindahan penduduk WNI				
		2) Perpindahan penduduk WNA dalam wilayah Indonesia				
		3) Perpindahan penduduk WNA dan WNI tinggal sementara				

	4) Daerah terbelakang 5) Bedoldesa				
c.	Perpindahan Penduduk Antar Negara	Terbatas	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	1) Penduduk Indonesia ke luar negeri 2) Orang asing tinggal sementara 3) Orang asing tinggal tetap 4) Perpindahan penduduk antar Negara di wilayah perbatasan antar Negara (pelintas batatradisional)				
d.	Pendaftaran Pengungsi dan Penduduk Rentan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	1) Akibat bencana alam 2) Akibat kerusuhan sosial 3) Pendaftaran penduduk daerah terbelakang 4) Pendaftaran penduduk rentan				
	PENCATATAN SIPIL				
a.	Kelahiran, Kematian, dan Advokasi	Terbatas	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	1) Kelahiran 2) Kematian 3) Advokasi kelahiran dan kematian 4) Perkawinan, perceraian dan				

	Advokasi				
b.	Perkawinan Agama Islam	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas OPD/unitkerja	Bidang Teknis
	1) Perkawinan agamanon Islam 2) Perceraian agamaislam 3) Perceraian agama nonislam 4) Advokasi perkawinandan Perceraian				
c.	Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak serta Perubahan dan Pembatalan Akta dan Advokasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas OPD/unitkerja	Bidang Teknis
	1) Pengangkatananak 2) Pengakuananak 3) Pengesahananak 4) Perubahanakta 5) Pembatalanakta 6) Advokasi pengurusan pengangkatan, pengakuan dna pengesahan anak serta perubahan dan pembatalan akta				
d.	Pencatatan Kewarganegaraan	Terbatas	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	1) Akibatperkawinan 2) Akibatkelahiran 3) Nonperkawinan 4) Nonkelahiran 5) Perubahan WNI keWNA 6) Perubahan WNA keWNI				

	INFORMASI KEPENDUDUKAN				
a.	Teknologi Informasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD /unit kerja	Bidang Teknis
	1) Perangkat keras 2) Perangkat lunak 3) Jaringan komunikasi data				
b.	Kelembagaan dan Sumber Daya Informasi	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD /unit kerja	Bidang Teknis
	1) Daerah maju 2) Daerah berkembang 3) Daerah terbelakang				
c.	Pengolahan Data Kependudukan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	1) Pendaftaran penduduk 2) Kejadian vital penduduk 3) Penduduk nonregistrasi				
d.	Pelayanan Informasi Kependudukan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	1) Media elektronik 2) Media cetak 3) Outlet				
	PERKEMBANGAN PENDUDUK				
a.	Pengarahan Kuantitas Penduduk	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	1) Struktur jumlah 2) Komposisi 3) Fertilitas 4) Kesehatan reproduksi 5) Morbiditas penduduk				

	6) Mortalitas penduduk				
b.	Pengembangan Kuantitas Penduduk	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	1) Anak danremaja 2) Penduduk usiaproduktif 3) Penduduk lanjutusia 4) Gender				
c.	Penataan Persebaran Penduduk	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	1) Migrasi antarwilayah 2) Migrasi internasional 3) Urbanisasi 4) Sementara 5) Migrasi nonpermanen				
d.	Perlindungan dan Pemberdayaan Penduduk	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / unit kerja	Bidang Teknis
	1) Pengembangan sistem perlindunganpenduduk 2) Pelayanan kelembagaan ekonomi 3) Pelayanankelambagaan sosialbudaya 4) Partisipasimasyarakat				
e.	Pengembangan Wawasan Kependudukan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / unit kerja	Bidang Teknis
	1) Pendidikan jalursekolah 2) Pendidikan jalur luar sekolah 3) Pendidikanjalur				

	masyarakat 4)Pembangunan berwawasan kependudukan				
	PROYEKSI DAN PENYERASIAN KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN				
a.	Indikator Kependudukan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	1) Perumusan penetapan pengembangan indikator kependudukan 2) Pemanfaatan indikator kependudukan 3) Sosialisasi indikator kependudukan				
b.	Proyeksi Penduduk	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD /unit kerja	Bidang Teknis
	1) Penyusunan dan pengembangan proyeksi kependudukan 2) Pemanfaatan proyeksi kependudukan				
c.	Analisis Dampak Kependudukan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	1) Penyusunan dan pengembangan analisis dampak kependudukan 2) Pemanfaatan analisis dampak kependudukan				
d.	Penyerasian Kebijakan Lembaga Non Pemerintah	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	1) Lembaga internasional,				

	2) Lembaga masyarakat dan nirlaba, 3) Lembaga usahaswasta				
e.	Penyerasian Kebijakan Lembaga Pemerintah	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	1) Lembaga pemerintah 2) Pemerintah provinsi dan kota 3) Pemerintah kabupaten				
f.	Analisis	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	Berkas tentang analisis proyeksi dan penyerasian kebijakan kependudukan				
	MONITORING	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/ unit kerja	Bidang Teknis
	EVALUASI	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD /unit kerja	Bidang Teknis
	DOKUMENTASI KEPENDUDUKAN	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / unit kerja	Bidang Teknis
	KELUARGA BERENCANA	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	MEDIA MASSA				
	PENERBITAN	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / unit kerja	Bidang Teknis
	1) Surat kabar 2) Majalah 3) Buku				

		4) Penerjemahan 5) Buletin 6) Jurnal 7) Kliping				
482		RADIO	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		1) RRI 2) NonRRI 3) Radio luarnegeri 4) Radiointernet				
483		TELEVISI	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		1) TVRI 2) Swasta lokal,nasional, 3) Luarnegeri 4) Televisiinternet				
484		FILM	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
485		PERS	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		1) Kewartawanan, 2) Wawancara 3) Informasinasional				
486		GRAFIKA	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		Berkas tentang grafika cetak buku				
487		PENERANGAN	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD /unit kerja	Bidang Teknis
		Berkas tentang pameran non komersil				

488		OPERATION ROOM	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		Berkas tentang operation room terkait media massa				
489		HUBUNGAN MASYARAKAT	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		Berkas tentang hubungan masyarakat terkait media massa				

1' 1. BUPATI TAPIN, f,

ter

(...-----■)

M. ARIFIN ARPAN71--

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI TAPIN
 NOMOR : 07 TARTTIT 20 /9
 TANGGAL : /0 ,m7rT 20 19

VI. PEREKONOMIAN							
NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
					5	6	7
1	500		PEREKONOMIAN • DewanStabilisasi	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja 0 PD / unit kerj a	Bidang Teknis
	501	-	PENGADAAN PANGAN	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja 0 PD /unit kerj a	Bidang Teknis
	502		PENGADAAN SANDANG	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / unit kerj a	Bidang Teknis
	503	-	Perizinan pada umumnya untuk perizinan suatu bidang, klasifikasi pada masalahnya (IMB, SIUP, TDP, HO, TDG)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembagadaerah	Bidang Teknis
2	510	-	PERDAGANGAN / TATANIAGA				
			-Promosi Perdagangan - PekanRaya	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	Eselon III Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

		<ul style="list-style-type: none"> - Iklan - Pameran/ Ekspokomersil - Pelelangan - Tera/Timbang - Ulang/ Kalibrasi 	<p>Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka</p>	<p>Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III</p>		
511	-	<p>Pemasaran</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sembilan Bahan Pokok - Pasar Tradisional - Pasar Modern - Pertokoan, Kaki Lima, Kios 	<p>Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka</p>	<p>Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III</p>	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
512	-	EKSPOR	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
513	-	IMPOR	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
514	-	PERDAGANGAN ANTAR PULAU	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
515	-	PERDAGANGAN LUAR NEGERI	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
516	-	PERGUDANGAN; TERMASUK TANGKI PENYIMPANAN MINYAK GORING	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
517	-	ANEKA USAHA PERDAGANGAN	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
518	-	KOPERASI (UNTUK BUUD, KUD, KUR)	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
3	520	PERTANIAN				

521.	<p>Tanaman Pangan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Program <ul style="list-style-type: none"> - Bimas/Inmas termsukkredi - Penyuluhan - Produksi <ul style="list-style-type: none"> - Padi/ Panen - Palawija - Jagung - KetelaPohon/Ubi-ubian - Hortikultura - Sayuran/Buah-buahan - TanamanHias - Pembudidayaan RumputLaut - Saran UsahaPertanian <ul style="list-style-type: none"> - Peralatan - Pembibitan - Pupuk - PerlindunganTanaman <ul style="list-style-type: none"> - Penyakit, Penyakit Daun, PenyakitBatang - Hama-hama serangga, wereng, Walang sangit, tungro, hama tikus dansejenisnya - Pemberantasan hama, meliputi : penyemprotan, penyiangan,geropyokan, sprayer, pemberantasan melaluiudara - Pestisida - Tanah PertanianPangan <ul style="list-style-type: none"> - Persawahan - Perladangan - Kebun - Rumpon IkanLaut - KTA/ LahanKritis 	<p>Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka</p> <p>Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka</p> <p>Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka</p> <p>Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka</p> <p>Biasa/Terbuka</p> <p>Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka</p>	<p>Eselon III Eselon III</p> <p>Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III</p> <p>Eselon III Eselon III Eselon III</p> <p>Eselon III Eselon III</p> <p>Eselon III</p> <p>Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III</p>	<p>Tidak memiliki dampak yang mengganggukinerja</p>	<p>Bidang Teknis</p>
------	--	---	---	--	-----------------------------

		<ul style="list-style-type: none"> - PengusahaPetani - BinaUsaha <ul style="list-style-type: none"> - PascaPanen - PemasaranHasil - Kelompoktani - Rukuntani 	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	Eselon III Eselon III		
522	-	Kehutanan <ul style="list-style-type: none"> - Program <ul style="list-style-type: none"> - Hak PengusahaanHutan - Tata GunaHutan - PerpetaanHutan - Tumpangsari - Produksi <ul style="list-style-type: none"> - Kayu - NonKayu - Sarana UsahaKehutanan - Penghijauan,Reboisasi - Kelestarian <ul style="list-style-type: none"> - Cagar Alam, Margasatwa, Suaka Margasatwa - Berburu, meliputi larangan danizin berburu - KebunBinatang - KonservasiLahan - Penyakit/Hama - Jenis-jenishutan <ul style="list-style-type: none"> - HutanHidup - HutanWisata - HutanProduksi - HutanLindung 	Terbatas Terbatas Terbatas Terbatas Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembagadaerah Tidak memiliki dampak yang mengganggukinerja	Bidang Teknis Bidang Teknis

523	Perikanan Program - Penyuluhan - Teknologi - Produksi - Pelelangan - Usaha Perikanan - Pembibitan - Daerah Penangkapan - Pertambakan, meliputi : tambak ikan deras, tambak udang dan lain-lain - Sarana - Peralatan - Kapal - Pelabuhan	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
524	Peternakan Produksi - Susu ternak rakyat - Telur - Daging - Kulit - Sarana Usaha Ternak - Pembibitan - Kandang ternak - Kesehatan Hewan - Penyakit Hewan - Pos Kesehatan Hewan - Tesi Pullorum - Karantina - Pemberantasan Penyakit Hewan termasuk upaya pencegahannya	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

		<ul style="list-style-type: none"> - Perunggasan - Pengembangan Ternak - Inseminasi Buatan - Pembibitan/Bibit Unggul - Penyebaran Ternak - Makanan Ternak - Tempat Pemotongan Hewan - Data Peternakan 	<p>Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka</p>	<p>Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III</p>		
525	-	<p>Perkebunan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Program - Produksi - Karet - The - Tembakau - Tebu - Cengkeh - Kopra - Kopi - Cokelat - Aneka Tanaman 	<p>Biasa/Terbuka</p> <p>Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka</p>	<p>Eselon III</p> <p>Eselon III Eselon III</p>	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
530	-	<p>Perindustrian</p> <ul style="list-style-type: none"> - Undang-undang Gangguan 	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
531	-	Industri Logam	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
532	-	Industri Mesin/Elektronik	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
533	-	Industri Kimia/Farmasi	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

534	-	Industri Tekstil	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
535	-	Industri Makanan/ Minuman	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
536	-	Aneka Industri/Perusahaan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
537	-	Aneka Kerajinan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
538	-	Usaha Negara/BUMN - Perusahaan Jawatan - Perusahaan Umum - Persero/PT, CV, UD, Firma	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	Eselon III Eselon III Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
539	-	Perusahaan Daerah/BUMD	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
540	-	Pertambangan/ Kesamuderaan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		PERTAMBANGAN/ KESAMUDERAAN				
541	-	BBM	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
542	-	Gas Bumi - Eksploitasi/ Pengeboran - Kontrak Kerja - Pengolahan Tangki, Pompa Tanker	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	Eselon III Eselon III Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
543	-	Logam Mulia - Emas - Intan/Batu Mulia - Perak	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	Eselon III Eselon III Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

554	-	Pos	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
555	-	Telekomunikasi - Telepon, HT - Telegram - Telex/ SSB, Faximile - Satelit, Internet - Stasiun Bumi, Parabola - Menara Telekomunikasi	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
556	-	Pariwisata dan Rekreasi - Obyek Kepariwisata - Perhotelan - Travel Service - Tempat Rekreasi Tempat sejarah/monumen	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
557	-	Meteorologi - Ramalan Cuaca - Curah Hujan - Kemarau Panjang	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	Eselon III Eselon III Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		TENAGA KERA				
560	..	Tenaga Kerja - Pengangguran	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
561	-	Upah	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
562	..	Penempatan Tenaga Kerja, TKI - Outsourcing	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

563		Latihan Kerja, Magang	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
564		Tenaga Sukarela - Butsi - Padat Karya	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	Eselon III Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
565		Perselisihan Perburuhan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis
566		Keselamatan Kerja	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
567		Pemutusan Hubungan Kerja	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis
568		Kesejahteraan Buruh (Kesehatan, Perumahan, dll.)	Biasa/Terbuka	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis
569		Tenaga Orang Asing	Biasa/Terbuka	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis
		PERBANKAN / MONETER				
570		Permodalan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis
571		Modal Domestik	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan	Bidang Teknis

					tugas lembaga daerah	
572	-	Modal Asing	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis
573	-	Modal Patungan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis
574	-	Pasar Uang dan Modal	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis
575	-	Saham	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis
580	-	Perbankan/Moneter	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis
581	-	Kredit	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis
582	-	Investasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis
583	-	Deposito	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis

584	-	Bank Pembangunan Daerah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis
585	-	Asuransi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsidan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis
586	-	Alat Pembayaran, Cek, Giro, Wesel, Transfer	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsidan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis
587	-	Fiskal	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsidan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis
588	-	Hutang Negara, Obligasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsidan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis
589	-	Moneter	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsidan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis
590	-	Agraria	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsidan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis
591	-	Tata Guna Tanah - Pemetaan dan Pengukuran - Perpetaan - Penyediaan Data - Fatwa Tata Guna Tanah - Tanah Kritis	Terbatas Terbatas Terbatas Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis

592	<p>Landreform Redistribusi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pendaftaran Pemilikan danPengurusan. - Penentuan Tanah ObyekLandreform - Pembagian Tanah ObyekLandreform - SengketaRedistribusi - Tanah ObyekLandreform - GantiRugi - Ganti Rugi Tanah Kelebihan, meliputiSengketa ganti rugi tanahkelebihan - Ganti Rugi Tanah Absentee, meliputiSengketa ganti rugi tanahabsentee - Ganti Rugi Tanah Partikelir, meliputiSengketa ganti rugi tanahpartikelir - BagiHasil - Penetapan Imbangan BagiHasil - Pelaksanaan Perjanjian BagiHasil - Sengketa Perjanjian BagiHasil - GadaiTanah - Pendaftaran Pelaksanaan GadaiTanah - Pelaksanaan GadaiTanah - Sengketa GadaiTanah - Bimbingan danPenyuluhan - Pengembangan - Yayasan Dana Landreform(YDL) 	<p>Terbatas Terbatas Terbatas Terbatas</p> <p>Terbatas</p> <p>Terbatas</p> <p>Terbatas</p> <p>Terbatas Terbatas Terbatas</p> <p>Terbatas Terbatas Terbatas</p> <p>Terbatas Terbatas Terbatas</p>	<p>Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III</p> <p>Eselon III</p> <p>Eselon III</p> <p>Eselon III</p> <p>Eselon III Eselon III Eselon III</p> <p>Eselon III Eselon III Eselon III</p> <p>Eselon III Eselon III Eselon III</p>	<p>Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembagadaerah</p>	<p>Bidang Teknis</p>
593	<p>Pengurusan Hak-hak Tanah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Program dan BimbinganTeknis - SewaTanah - Sewa Tanah untuk Tanaman tertentu; tebu, tembakau, rosella,corchorus - HakMilik 	<p>Terbatas</p> <p>Terbatas</p> <p>Terbatas</p>	<p>Eselon III</p> <p>Eselon III</p> <p>Eselon <u>III</u></p>	<p>Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembagadaerah</p>	<p>Bidang Teknis</p>

	Perorangan BadanHukum - HakPakai - Perorangan, Warga Negara Indonesia(WNI) Perseorangan, Warga Negara Asing(WNA) BadanHukum Badan HukumIndonesia - Badan Hukum Asing, Kedutaan, Konsulat Kantor DagangAsing - Tanah Gedung-gedungNegeri - GunaUsaha - PerkebunanBesar - PerkebunanRakyat - Peternakan - Perikanan Kehutanan - Hak GunaBangunan - Perorangan - BadanHukum P3MB (Panitia Penguasaan MilikBelanda) Badan Hukum Asing Belanda-PRKNo.5165 - Pemulihan Hak (PerPres4/1960) HakPengelolaan PN Perumnas, Bonded Ware House,Industrial Estate, RealEstate Perusahaan Daerah PembangunanPerumahan - SengketaTanah - Peradilan Perkara Tanah (lihat klasifikasi183) - Pencabutan dan PembebasanTanah - PencabutanHak - PembebasanTanah - Ganti RugiTanah	Terbatas Terbatas Terbatas Terbatas Terbatas Terbatas Terbatas Terbatas Terbatas Terbatas Terbatas Terbatas Terbatas Terbatas Terbatas Terbatas Terbatas Terbatas Terbatas Terbatas Terbatas Terbatas	Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III		
--	--	--	---	--	--

594	Pendaftaran Tanah Pengukuran/Pemetaan Fotogrametri Terristis Triangulasi Peralatan Dana Pengukuran (PerMen Agrariallo.61/1965) - Sertifikat Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPAT) Ajudikasi	Terbatas Terbatas Terbatas Terbatas Terbatas Terbatas Terbatas Terbatas	Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon. III Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembagadaerah	Bidang Teknis
595	Lahan Transmigrasi Tata GunaTanah Landreform Pengurusan Hak-hakTanah PendaftaranTanah	Terbatas Terbatas Terbatas Terbatas	Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembagadaerah	Bidang Teknis
596	Tanahkosong	Terbatas	Eselon HI	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsidan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis

BUPATI



M. ARIFIN ARPAN A--

VII. PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAKERJAAN

NO	KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	
1	2	3	4	5	6	
1	600	Tata Bangunan Konstruksi, dan Industri Konstruksi	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD /unit kerja	Bidang teknis
	602	Kontraktor Pemborong <ul style="list-style-type: none"> - Tender /lelang - Penunjukanlangsung - Prakuifikasi <ul style="list-style-type: none"> • Daftar Rekanan Mampu(DRM) • Tanda Daftar Rekanan(TDR) 	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD / unit kerja	Bidang Teknis
	603	Arsitektur	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD /unit kerja	Bidang Teknis
	604	Bahan Bangunan <ul style="list-style-type: none"> - Tanah danbatu - Aspal, Aspal buatan, Aspalalam - Besi dan logamlainnya <ul style="list-style-type: none"> • Besibeton 	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD /unit kerja	Bidang Teknis

	<ul style="list-style-type: none"> • Besiprofil • Paku • Alumunium,profil <ul style="list-style-type: none"> - Bahan-bahan perlindungan danpengawet - Semen - Kayu seperti balok, papan,dolken - Bahan penutupatap - Alat-alat penggantung danpengunci - Bahan-bahan bangunanlainnya 				
605	<p>Instalasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Instalasibangunan - Instalasilistrik - Instalasi airsantasi - Instalasi pengaturudara - Instalasiakustik - Instalasi cahaya /penerangan 	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
606	<p>Konstruksi Pencegahan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Konstruksi pencegahan terhadapkebakaran - Konstruksi pencegahan terhadapgempa - Konstruksi pencegahan terhadap anginudara - Konstruksi pencegahan terhadapkegaduhan - Konstruksi pencegahanterhadap gas/ explosive - Konstruksi pencegahan terhadapserangga - Konstruksi pencegahan terhadap radiasiatom 	terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
610	<p>Irigasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bangunan waduk <ul style="list-style-type: none"> * Bendungan * Tanggul * Pelimpahanbanjir * Menarapengambilan - Bangunanpengambilan <ul style="list-style-type: none"> • Bendungan 	terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis

- | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Bendungan dengan pintubilas • Bendungan denganpompa • Pengambilanbebas • Pengambilan bebas denganpompa • Sumur denganpompa • Kantonglumpur • Siltekstraktor • EscapeChannel - Bangunanpembawa <ul style="list-style-type: none"> • Saluran • Bangunan • BoxTersier • Got miring • Talang • Syphon • Gorong-gorong • Pelimpahsamping - BangunanPembuang <ul style="list-style-type: none"> • Saluran • Bangunan • Gorong-gorongpembuang • Talangpembuang • Syphonpembuang - Bangunan lainnya <ul style="list-style-type: none"> • Jalan • Jembatan • Tanggacuci • Kubangankerbau • Waduk lapangan • Bangunanpenunjang • Jaringan telepon - Stasiunagro | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|

611	Folder: Tanggulkeliling <ul style="list-style-type: none"> • Tanggul • Bangunan penutupsungai • Jembatan Bangunanpembawa <ul style="list-style-type: none"> • Saluran • Stasiun pompapemasukan • Bangunanbagi • Gorong-gorong • Syphon Bangunanpembuang <ul style="list-style-type: none"> • Stasiun pompapembuang • Saluran • Pintu airpembuangan • Gorong-gorongpembuangan • Syphonpembuangan Bangunan lainnya <ul style="list-style-type: none"> • Bangunan Rumah petugaseksplorasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
612	Pasang Surut Bangunanpembawa <ul style="list-style-type: none"> • Saluran • Bangunan pintupemasukan Bangunanpembuang <ul style="list-style-type: none"> • Saluran • Bangunan pintupembuang Bangunan lainnya <ul style="list-style-type: none"> • Kolampasang • Saluran • Bangunan • Jalan 	terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis

	- Jembatan				
613	Pengendalian Sungai - Bangunan.pengaman <ul style="list-style-type: none"> • Tanggulbanjir • Pintu pengaturbanjir • Klep pengaturbanjir • Tembok pengamantalud • Krib • Kantunglumpur • Chek-dam • Syphon - Saluranpengaman <ul style="list-style-type: none"> • Saluranbanjir • Salurandrainage • Corepure - Bangunan lainnya <ul style="list-style-type: none"> • Warningsystem - Stasiun	terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
614	Pengamanan Pantai - Tanggul - Krib - Bangunan lainnya	terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
615	Air Tanah - Stasiunpompa - Bangunanpembawa - Bangunanpembuang - Bangunan lainnya	terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
620	Jalan Kota - Daerahpenguasaan <ul style="list-style-type: none"> • Tanah 	terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan togas	Bidang Teknis

	<ul style="list-style-type: none"> • Tanaman • Bangunan - Bangunansementara <ul style="list-style-type: none"> • Jalansementara • Jembatansementara • Kantorproyek • Gudangproyek • Barakkerja • Laboratoriumlapangan • Rumah - Badan jalan <ul style="list-style-type: none"> • Pekerjaantanah • Stabilitas - Perkerasan <ul style="list-style-type: none"> • Lapis pondasibawah • Lapispondasi • Lapispermukaan - Drainage <ul style="list-style-type: none"> • Parittanah • Gorong-gorong - BukuTrotuir <ul style="list-style-type: none"> • Tanah • Perkerasan • Pasangan - Median <ul style="list-style-type: none"> • Tanah • Tanaman • Perkerasan • Pasangan - Daerahsamping <ul style="list-style-type: none"> • Tanaman • Pagar 				
--	---	--	--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> - Bangunan pelengkap dan pengamanan <ul style="list-style-type: none"> • Rambu-rambu/ tanda lalu lintas • Lampu penerangan • Lampu pengatur lalu lintas • Patok-patok KM • Patok-patok ROW (Sempadan) • Relpengamanan • Pagar • Turap, penahan - Bronjong 				
621	<p>Jalan Luar Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> - Daerah penguasaan <ul style="list-style-type: none"> • Tanah • Tanaman • Bangunan - Bangunan sementara <ul style="list-style-type: none"> • Jalan sementara • Jembatan sementara • Kantor proyek • Gedung proyek • Barak kerja • Laboratorium lapangan • Rumah - Badan jalan <ul style="list-style-type: none"> • Pekerja tanah • Stabilisasi - Perkerasan <ul style="list-style-type: none"> • Lapis pondasi • Lapis pondasi bawah • Lapis permukaan - Drainage <ul style="list-style-type: none"> • Parit 	terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis

	<ul style="list-style-type: none"> • Gorong-gorong • Subdrainage <p>Trotoar</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tanah • Perkerasan <p>Median</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tanah • Tanaman • Perkerasan • Pasangan <p>Daerahsamping</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tanaman • Pagar <p>Bangunan perlengkapan dampengaman</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rambu-rambu / Tanda lalu lintas • Lampupenerangan • Lampu lalu lintas • Patok-patokKM • Patok-patokROW • Rel-relpengaman • Pagar • Turappengaman <p>Bronjong</p>				
	<p>Jalan Layang</p> <p>Jembatan pada Jalan Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> - Daerahpenguasaan <ul style="list-style-type: none"> • Tanah • Tanaman 	<p>terbuka</p> <p>terbuka</p>	<p>Eselon III</p> <p>Eselon III</p>	<p>Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi <u>dan tugas</u></p> <p>Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas</p>	<p>Bidang Teknis</p> <p>Bidang Teknis</p>

- Bangunan
- Bangunansementara
 - Jalansementara
 - Jembatansementara
 - Kantorproyek
 - Gudangproyek
 - Barakkerja
 - Laboratoriumlapangan
 - Rumah
- Pekerjaantahan
 - Galian tanah
 - Timbunantahan
- Pondasi
 - Pondasi kepalajalan
 - Pondasipilar
 - Angker
- Bangunanbawah
 - Kepalajembatan
 - Pilar
 - Pilon
 - Landasan
- Bangunan
 - Gelagar
 - Lantai
 - Perkerasan
 - Jalanorang/Trotoar
 - Sandaran
 - Talangair
- Bangunan/pengaman
 - Turap/penahan
 - Bronjong
 - Strekdam

	<ul style="list-style-type: none"> • Kistdam • Corepure • Krib <ul style="list-style-type: none"> - Bangunanpelengkap <ul style="list-style-type: none"> • Rambu-rambu / Tanda lalulintas • Lampupenerangan • Lampu lalulintas • Patok-patokKM • Patok-patokROW • Rel-relpengaman • Pagar - Oprit <ul style="list-style-type: none"> • Badan • Perkerasan • Drainage • Baku - Median 				
632	<p>Jembatan pada Jalan Luar Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> - Daerahpenguasaan <ul style="list-style-type: none"> • Tanah • Tanaman • Bangunan - Bangunansementara <ul style="list-style-type: none"> • Jalansementara • Jembatansementara • Kantorproyek • Gudangproyek • Barakkerja • Laboratoriumlapangan • Rumah - Pekerjaantanah <ul style="list-style-type: none"> • Galian tanah 	terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis

- Timbunantanah
- Pondasi
 - Pondasi kepalajalan
 - Pondasipilar
 - Angker
- Bangunanbawah
 - Kepalajembatan
 - Pilar
 - Pilon
 - Landasan
- Bangunanatas
 - Gelagar
 - Lantai
 - Perkerasan
 - Jalanorang/Trotoar
 - Sandaran
 - Talangair
- Bangunanpengaman
 - Turap/penahan
 - Bronjong
 - Strekdam
 - Kistdam
 - Corepure
 - Krib
- Bangunanpelengkap
 - Rambu-rambu / Tanda lalulintas
 - Lampupenerangan
 - Lampu lalulintas
 - Patok-patokKM
 - Patok-patokROW
 - Rel-relpengaman
 - Pa gar

	<ul style="list-style-type: none"> - Oprit <ul style="list-style-type: none"> • Badan • Perkerasan • Drainage • Baku - Median 				
640	Bangunan Pemerintah <ul style="list-style-type: none"> - Gedung pengadilan - Rumah pejabat Negara - Gedung DPR - Gedung Balai kota - Penjara - Perkantoran - Rumah Dinas 	terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
642	Bangunan Pendidikan <ul style="list-style-type: none"> - Taman kanak-kanak - SD dan Sekolah Menengah - Perguruan Tinggi - Tempat Kursus/Lembaga Pendidikan - Tempat Diklat 	terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
643	Bangunan Rekreasi <ul style="list-style-type: none"> - Bangunan Olah Raga - Gedung Kesenian - Gedung Pemancar 	terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
644	Bangunan Perdagangan <ul style="list-style-type: none"> - Pusat Perbelanjaan (Pasar, Mall, Supermarket, dept. Store) - Gedung Perdagangan - Bank - Perkantoran 	terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis

645	<p>Bangunan Pelayanan Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mandi, Cuci, Kakus (MCK)Umum - GedungParkir - Rumah Sakit /Puskesmas - GedungTelkom - Terminal Angkutan Udara - Terminal Angkutan Air - Terminal Angkutan darat - BangunanKeagamaan - Halte / Shelter 	terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
646	<p>Bangunan Peninggalan Sejarah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Monumen - Candi - Keraton - RumahTradisional - Heritage 	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
647	Bangunan Industri	terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
648	<p>Bangunan Tempat Tinggal</p> <ul style="list-style-type: none"> - RumahPerkotaan <ul style="list-style-type: none"> • Inti/ Sederhana • Sedang/ Mewah • RumahSusun - RumahPedesaan <ul style="list-style-type: none"> • RumahContoh - RealEstate 	terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis

649	<p>Elemen. Bangunan</p> <p>Pondasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Di atastiang <p>Dinding</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penahanbeban • Tidak menahanbeban <p>Atap</p> <p>Lantai/ Langit-langit</p> <ul style="list-style-type: none"> • Suspanded • Solit <p>Pintu/Jendela</p> <ul style="list-style-type: none"> • PintuHarmonik • Pintubiasa • Pintusorong • Pintukayu • Jendelasorong <p>Jendelavertical</p>	terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
650	<p>Tata Kota</p> <p>Daerah Perdagangan/Pelabuhan</p> <p>Daerah pusatperbelanjaan</p> <p>Daerahperkotaan</p>	terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
651	Daerah Pemerintah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
653	<p>Daerah Perumahan</p> <p>Kepadatanrendah</p> <p>Kepadatantinggi</p>	terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis

	<ul style="list-style-type: none"> - Kepadatanrendah - Kepadatantinggi 				
654	Daerah Industri <ul style="list-style-type: none"> - Industrierberat - Industriringan - Industrirumah 	terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
655	Daerah Rekreasi <ul style="list-style-type: none"> - Tamankota - Tempat olah raga danbermain - Ruangterbuka 	terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
656	Transportasi <ul style="list-style-type: none"> - Jaringanjalan - Peneranganjalan - Jaringan keretaapi - Jaringan sungai 	terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
657	Assainering <ul style="list-style-type: none"> - Saluranpengumpulan - Instalasipengolahan <ul style="list-style-type: none"> • Bangunan • Unit Desinfektan - UnitPerpompaan 	terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
658	Kesehatan Lingkungan <ul style="list-style-type: none"> - Persampahan <ul style="list-style-type: none"> - Bangunanpengumpul <ul style="list-style-type: none"> • Bangunanpemusnahan - PengotoranUdara - PengotoranAir <ul style="list-style-type: none"> • Air buanganindustri - Kegaduhan/Polusi Suara 	terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis

	- Kebersihan Kota				
660	Tata Lingkungan Daerah Hutan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
662	Daerah Pertanian	terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
663	Daerah Pemukiman	terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
664	Pusat Pertumbuhan	terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
665	Transportasi - Jaringan jalan - Jaringan kereta api - Jaringan sungai	terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
670	Ketenagaan Listrik - Kelistrikan • Kelistrikan PLN • Kelistrikan non PLN - Pembangkit tenaga listrik	terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis

	<ul style="list-style-type: none"> • PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air) • PLTD (Pembangkit Listrik Tenaga Diesel) • PLTG (Pembangkit Listrik Tenaga Gas) • PLTM (Pembangkit Listrik Tenaga Matahari) • PLTN (Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir) • PLTPB (Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi) • PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) <ul style="list-style-type: none"> - Transmisi tenaga listrik <ul style="list-style-type: none"> • Gardu induk/gardu penghubung/gardu trafo • Saluran udara tegangantinggi • Kabel bawahtanah - Distribusi tenaga listrik <ul style="list-style-type: none"> • Gardudistribusi • Teganganrendah • Teganganmenengah • Jaringan bawahtanah - Pengusahaan listrik <ul style="list-style-type: none"> • Sambungan listrik • Penjualan tenaga listrik - Tarif listrik 				
672	Tenaga Air	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis

673	Tenaga Minyak	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
674	Tenaga Matahari	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
675	Tenaga Uap	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
676	Tenaga Lainnya	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
680	Peralatan	Terbuka	Eselon III	Tidak mMemiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
690	Air Minum Intake - Broncaptering - Sumur - Bendungan - Saringan - Pintuair - Saluranpembawa	terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis

	<ul style="list-style-type: none">- Katup<ul style="list-style-type: none">• Katup udara• Katup pelepas- Bak Pelepas Tekanan				
--	--	--	--	--	--

BUPATI TAPIN; Ir



M. ARIFIN ARPAN

LAMPIRAN VIII PERATURAN BUPATI TAPIN

NOMOR : 077/II/IT/D/19
TANGGAL 10, TITIT 20 'Ng

VIII. PENGAWASAN						
NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
1	PWS	PENGAWASAN				
	700	- Monitoring, Pemeriksaan, Audit	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	701	- Bidang Urusan Dalam	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat Daerah Unit Kerja	Bidang Teknis
	702	- Bidang Peralatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat Daerah Unit Kerja	Bidang Teknis
	703	- Bidang Kekayaan Daerah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat Daerah Unit Kerja	Bidang Teknis

	704	-	Bidang Perpustakaan/ Dokumentasi/ Kearsipan / Sand i	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat Daerah Unit Kerja	Bidang Teknis
	705	-	Bidang Perencanaan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat Daerah Unit Kerja	Bidang Teknis
	707	-	Bidang Penelitian	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat Daerah Unit Kerja	Bidang Teknis
	708	-	Bidang Konferensi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat Daerah Unit Kerja	Bidang Teknis
	709	-	Bidang Perjalanan Dinas	Terbuka	Eselon HI	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat Daerah Unit Kerja	Bidang Teknis
2.	710		BIDANG PEMERINTAHAN	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis

711	-	Bidang Pemerintahan Pusat	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
712	-	Bidang Pemerintahan Propinsi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
713	-	Bidang Pemerintahan Kabupaten /Kota	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
714	-	Bidang Pemerintahan Desa	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
715	-	Bidang MPRIDPR	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
716	-	Bidang DPRD Propinsi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
717	-	Bidang DPRD Kabupaten/ Kota	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis

	718	-	Bidang Hukum	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	719	-	Bidang Hubungan Luar Negeri	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
3	720		BIDANG POLITIK				
	721	-	Bidang Kepartaian	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit Kerja	Bidang Teknis
	722	-	Bidang Organisasi Masyarakat	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	723	-	Bidang Organisasi Profesi dan Fungsional	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	724	-	Bidang Organisasi Pemuda	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	725	-	Bidang Organisasi Buruh, Tani, dan Nelayan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi	Bidang Teknis

						dan tugas perangkat daerah unit kerja	
	726	-	Bidang Organisasi Wanita	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	727	-	Bidang Pemilihan Umum	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
4	730		BIDANG KEAMANAN/KETERTIBAN	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	731	-	Bidang Pertahanan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit Kerja	Bidang Teknis
	732	-	Bidang Kemiliteran	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	733	-	Bidang Perlindungan Masyarakat	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis

	734	-	Bidang Keamanan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	735	-	Bidang Kejahatan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	736	-	Bidang Bencana	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	737	-	Bidang Kecelakaan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
5	740		BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	741	-	Bidang Pembangunan Desa	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit Kerja	Bidang Teknis
	742	-	Bidang Pendidikan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit Kerja	Bidang Teknis

	743	-	Bidang Kebudayaan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	744	-	Bidang Kesehatan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	745	-	Bidang Agama	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	746	-	Bidang Sosial	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	747	-	Bidang Kependudukan	Terbatas	Eselon HI	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit Kerja	Bidang Teknis
	748	-	Bidang Media Masa	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
6	750		BIDANG PEREKONOMIAN	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi	Bidang Teknis

						dan tugas perangkat daerah unit kerja	
751	-	Bidang Perdagangan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis	
752	-	Bidang Pertanian	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis	
753	-	Bidang Perindustrian	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis	
754	-	Bidang Pertambangan / Kesamudraan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis	
755	-	Bidang Perhubungan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis	
756	-	Bidang Tenaga Kerja	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis	
757	-	Bidang Permodalan	Biasa/	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat	Bidang Teknis	

				Terbuka		mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	
	758	-	Bidang Tentang Perbankan / Moneter	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit Kerja	Bidang Teknis
	759	-	Bidang Tentang Agraria	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
7	760		BIDANG PEKERJAAN UMUM				
	761	-	Bidang Pengairan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	762	-	Bidang Jalan	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	763	-	Bidang Jembatan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	764	-	Bidang Bangunan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit Kerja	Bidang Teknis

	765	-	Bidang Tata Kota	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	766	-	Bidang Lingkungan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	767	-	Bidang Ketenagaan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	768	-	Bidang Peralatan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	769	-	Bidang Air Minum	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
8	780		BIDANG KEPEGAWAIAN				
	781	-	Bidang Pengadaan Pegawai	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	782	-	Bidang Mutasi Pegawai	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi	Bidang Teknis

						dan tugas perangkat daerah unit kerja	
783	-	Bidang Kedudukan Pegawai	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis	
784	-	Bidang Kesejahteraan Pegawai	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis	
785	-	Bidang Cuti	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis	
786	-	Bidang Penilaian	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis	
787	-	Bidang Tata Usaha Kepegawaian	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis	
788	-	Bidang Pemberhentian Pegawai	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis	

	788	-	Bidang Pendidikan Pegawai	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja a	Bidang Teknis
9	790		BIDANG KEUANAGAN				
	791	-	Bidang Anggaran	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	792	-	Bidang Otorisasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja a	Bidang Teknis
	793	-	Bidang Verifikasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	794	-	Bidang Pembukuan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	795	-	Bidang Perbendaharaan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	796	-	Bidang Pembinaan Kebendaharaan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit Kerja a	Bidang Teknis

	797	-	Bidang Pendapatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	799	-	Bidang Perbendaharaan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis

ik4- BUPATI TAPIN, |

M. ARIFIN ARPAN

LAMPIRAN IX PERATURAN BUPATI TAPIN
 NOMOR : 7 m A r 20 1c)
 TANGGAL : /0 J-TTTIT 201.

IX. KEPEGAWAIAN

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
1	801	Bidang Pengadaan Pegawai	terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas unit kerja	Bidang Teknis
	802	Bidang Mutasi Pegawai	terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	803	Bidang Kedudukan Pegawai	terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis

	804	Bidang Kesejahteraan Pegawai	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	805	Bidang Cuti	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	806	Bidang Penilaian	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	807	Bidang Tata Usaha Kepegawaian	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	808	Bidang Pemberhentian Pegawai	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis

	809	Bidang Pendidikan Pegawai	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki Bidang dampak yang dapat Teknis Mengganggu Pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja
--	-----	---------------------------	---------	------------	---

BUPATI TAPIN,



(/), M. ARIFIN ARPAN

LAMPIRAN X PERATURAN BUPATI TAPIN
 NOMOR : 07 mil-m-77 2019
 TANGGAL : 10 jr7ri 2019

X. KEUANGAN

NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
1	901	Nota Keuangan - Berkas pengantar nota keuangan APBD perubahan	terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sekretariat, Bidang
	902	APBN	terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sekretariat, Bidang
	903	APBD, RAPBD - Hibah - Bantuan Sosial	terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang
	904	Dana Alokasi Umum - Berkas pengajuan - Penyusunan DAU - Laporan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, - Bidang

905	Dana Alokasi Khusus - Berkas pengajuan - Penggunaan DAK - Laporan - Dana Bagi hasil	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat , Bidang
906	Dana Cadangan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat , Bidang
907	Penetapan dan prioritas plafon anggaran, penetapan prioritas anggaran sementara	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat , Bidang
908	Kebijakan alokasi umum, nota kesepakatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat , Bidang
910	ANGGARAN				Sekretariat , Bidang
911	Rutin/ Murni - APBD murni mulai dari perencanaan program di DPRD sampai penetapan perda APBD	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi	Sekretariat , Bidang

				dan tugas perangkat daerah unitkerja	
912	Pembangunan/ Kegiatan - Pengusulan anggaran pembiayaan/kegiatan - Penggunaan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unitkerja	Sekretariat, Bidang
913	Anggaran Belanja Tambahan/Anggaran Perubahan APBD - Mulai dari perencanaan sampai penetapan perubahan APBD	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang
914	Daftar Isian Kegiatan (DIK)/Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) - Daftar Usulan Kegiatan(DUK) - Pengusulan PraRKA - PengusulanRKA - Pembahasan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unitkerja	Sekretariat, Bidang
915	Daftar Isian Proyek (DIP)/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) - Daftar Usulan Proyek(DUP) - Daftar Isian Pengguna Anggaran(DIPA)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang
916	Revisi Anggaran/ Penyempurnaan APBD - Pengusulan realisasi APBD -	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang

917	Pembiayaan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unitkerja	Sekretariat, Bidang
918	Belanja langsung/tidak langsung	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang
920	OTORISASI/SKO/ Surat Penyediaan Dana (SPD)				Sekretariat, Bidang
921	Rutin/ Murni	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unitkerja	Sekretariat, Bidang
922	Pembangunan/ Kegiatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang
923	SIAP	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unitkerja	Sekretariat, Bidang

924	Ralat SKO/Revisi Surat Penyediaan Dana (SPD)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unitkerja	Sekretariat, Bidang
930	VERIFIKASI				Sekretariat, Bidang
931	SPM Rutin (Daftar P8)/SPM Murni, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang
932	SPM Pembangunan (Daftar P8)/SPM Kegiatan, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)Kegiatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unitkerja	Sekretariat, Bidang
933	Penerimaan (Daftar P6. P7)/ Pendapatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang
934	SPJ Rutin/ SPJ Murni	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unitkerja	Sekretariat, Bidang

935	SPJ Pembangunani SPJ Kegiatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unitkerja	Sekretariat, Bidang
936	Nota Pemeriksaan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang
937	SP Pemindahan Pembukuan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unitkerja	Sekretariat, Bidang
940	PEMBUKUAN				Sekretariat, Bidang
941	Penyusunan Perhitungan Anggaran	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang
942	Permintaan Data Anggaran Laporan Fisik Pembangunan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unitkerja	Sekretariat, Bidang

943	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) - Neraca - Catatan anggaranlaporankeuangan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unitkerja	Sekretariat, Bidang
950	PERBENDAHARAAN				Sekretariat, Bidang
951	Tuntutan Ganti Rugi (ICW Pasal 74)/Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang
952	Tuntutan Bendaharawan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unitkerja	Sekretariat, Bidang
953	Penghapusan Kekayaan Negara - AsetDaerah - Asetbergerak - Aset tidakbergerak - Aset tidakberwujud	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unitkerja	Sekretariat, Bidang
954	Pengangkatan/Penggantian Pemimpin Proyek / PPTK dan Pengangkatan/Pemberhentian Bendaharawan	terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sekretariat, Bidang

955	Specimen Tanda Tangan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unitkerja	Sekretariat, Bidang
956	Surat Tagihan Piutang, Ikhtisar Bulanan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang
957	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unitkerja	Sekretariat, Bidang
960	PEMBINAAN KEBENDAHARAAN				Sekretariat, Bidang
961	Pemeriksaan Kas dan Hasil Pemeriksaan Kas	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang
962	Pemeriksaan Administrasi Bendaharawan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unitkerja	Sekretariat, Bidang

963	Laporan Keuangan Bendaharawan - Laporan keuangan bulanan - Laporan keuangan tahunan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang
970	PENDAPATAN -Pendapatan ash daerah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang
971	Perimbangan Keuangan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang
972	Subsidi	terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sekretariat, Bidang
973	Pajak, Ipeda, H-IH, IHPH, PBB	terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sekretariat, Bidang
974	Retribusi	terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sekretariat, Bidang

975	Bea	terbuka	Eselon III	Tidak mengganggu pelaksanaan dan tugas	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi	Sekretariat, Bidang
976	Cukai	terbuka	Eselon III	Tidak mengganggu pelaksanaan dan tugas	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi	Sekretariat, Bidang
977	Pungutan	terbuka	Eselon III	Tidak mengganggu pelaksanaan dan tugas	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi	Sekretariat, Bidang
978	Bantuan Presiden, Menteri, Bantuan Propinsi, Bantuan Pemerintah, dan Bantuan lainnya.	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan dan tugas daerah unit kerja	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang
979	Pendapatan Perusahaan Milik Negara/Daerah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan dan tugas daerah unit kerja	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang
980	Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu	Memiliki dampak yang dapat mengganggu	Sekretariat, Bidang